



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SETYO HARIYADI SURANTO PUTRO**
2. Jabatan : **DOSEN**
3. NHK : **677007**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 599.052.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/124 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 269.340.000
2. Tanah Seluas 2.892 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, Rp. 138.816.000
3. Tanah Seluas 291 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, Rp. 50.256.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/139 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, Rp. 40.640.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 239.000.000**

1. MOTOR, HONDA BLADE SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2020, LAINNYA Rp. 190.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX 160 ROADSYNC Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 9.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 101.673.694**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 948.725.694

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 948.725.694

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.